

RINGKASAN ISI

KABUPATEN KEBUMEN, 2026. PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR DEMOKRAT TERHADAP RANCANGAN APBD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2027

Fraksi Golkar Demokrat pada prinsipnya menerima Raperda APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap rencana pendapatan daerah sebesar Rp3,017 triliun, yang terdiri atas PAD Rp582,760 miliar dan pendapatan transfer Rp2,434 triliun, Fraksi menilai ketergantungan Kabupaten Kebumen terhadap pendapatan transfer masih cukup tinggi. Pemerintah Daerah didorong memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, digitalisasi pemungutan, pengelolaan aset yang lebih produktif, penguatan BUMD, dan pengembangan sektor ekonomi potensial. Fraksi sekaligus mempertanyakan langkah konkret dan terukur Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Terhadap belanja daerah sebesar Rp3,092 triliun, Fraksi menegaskan bahwa keberhasilan APBD bukan semata-mata diukur dari tingginya penyerapan anggaran, tetapi dari manfaat dan dampak yang dihasilkan bagi masyarakat. Belanja pembangunan diminta diprioritaskan pada kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat, terutama jalan dan jembatan, irigasi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi. Besarnya anggaran pendidikan harus tercermin pada peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana, perlindungan peserta didik, serta kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik. Pelayanan kesehatan juga diminta diperkuat, terutama kesehatan ibu dan anak, pencegahan penyakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Fraksi juga mendorong APBD 2027 memperkuat ekonomi masyarakat melalui UMKM, koperasi, pertanian, perdagangan, industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Pemberdayaan masyarakat tidak diharapkan berhenti pada bantuan atau pelatihan, tetapi dilanjutkan dengan akses permodalan, pendampingan, teknologi, digitalisasi, dan pemasaran sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan dan stunting diminta dilakukan secara terpadu, berbasis data, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Secara khusus, program pendampingan keluarga berisiko stunting senilai Rp5,304 miliar dengan sasaran 40.718 keluarga diminta dikawal secara serius dan dievaluasi secara berkala. Sementara defisit RAPBD sebesar Rp75,228 miliar yang ditutup melalui pembiayaan neto diminta dikelola berdasarkan perhitungan yang realistis, terukur, akuntabel, dan memperhatikan keberlanjutan fiskal daerah.

Catatan:

- Pandangan Umum disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen pada 10 September 2026.
- Fraksi Golkar Demokrat menerima Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas dan ditindaklanjuti, dengan sejumlah catatan, rekomendasi, dan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah.
- Pertanyaan utama Fraksi diarahkan pada langkah konkret Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD sekaligus memastikan belanja benar-benar berdampak pada infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penguatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
- Dokumen ditandatangani oleh H. Munawar Cholil, B.A. selaku Ketua Fraksi dan Krismawati, S.Sos. selaku Sekretaris Fraksi.
- Dokumen terdiri atas 10 halaman.

Tag/Keyword: Pandangan Umum Fraksi; Golkar Demokrat; RAPBD 2027; APBD Kabupaten Kebumen; Kemandirian Fiskal; PAD; Infrastruktur; Pendidikan; Kesehatan; UMKM; Kemiskinan; Stunting

SUMMARY

KEBUMEN REGENCY, 2026. GENERAL VIEW OF THE GOLKAR DEMOKRAT FACTION ON THE DRAFT REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET OF KEBUMEN REGENCY FOR FISCAL YEAR 2027

The Golkar Demokrat Faction in principle accepts the Draft Regional Revenue and Expenditure Budget (RAPBD) of Kebumen Regency for Fiscal Year 2027 for further deliberation and follow-up in accordance with applicable procedures and regulations. Regarding the planned regional revenue of IDR 3.017 trillion, consisting of IDR 582.760 billion in Regional Own-Source Revenue and IDR 2.434 trillion in transfer revenue, the Faction considers Kebumen Regency's dependence on transfer revenue to remain relatively high. The Regional Government is therefore encouraged to strengthen fiscal independence by optimizing own-source revenue, digitalizing revenue collection, improving the productive management of regional assets, strengthening region-owned enterprises, and developing potential economic sectors.

Regarding the planned regional expenditure of IDR 3.092 trillion, the Faction emphasizes that the success of the APBD should not merely be measured by the level of budget absorption, but by the benefits and impacts generated for the community. Development expenditure should prioritize programs that directly address public needs, particularly roads and bridges, irrigation, education, health services, and infrastructure supporting economic growth. Education spending should result in better educational quality, more equitable facilities, student protection, and improved competence and welfare of educators, while the health sector should strengthen public health services, maternal and child health, disease prevention, and healthcare facilities.

The Faction also encourages the 2027 APBD to strengthen the local economy through MSMEs, cooperatives, agriculture, trade, industry, tourism, and the creative economy. Community empowerment should extend beyond financial assistance and training by providing sustainable access to financing, mentoring, technology, digitalization, and markets. Poverty and stunting reduction programs should be integrated, data-driven, well-targeted, and sustainable. In particular, the IDR 5.304 billion assistance program for 40,718 families at risk of stunting should be closely monitored and periodically evaluated. The planned IDR 75.228 billion budget deficit, to be covered through net financing, should meanwhile be managed realistically, measurably, accountably, and with due regard to Kebumen Regency's fiscal sustainability.

Note:

- *The General View was presented at a Kebumen Regency DPRD Plenary Meeting on September 10, 2026.*
- *The Golkar Demokrat Faction accepts the 2027 Draft APBD for further deliberation, subject to its observations, recommendations, and questions.*
- *The Faction's principal question concerns concrete measures to increase fiscal independence through own-source revenue while ensuring that expenditure directly improves infrastructure, reduces poverty, strengthens the local economy, and improves public welfare.*
- *The document was signed by H. Munawar Cholil, B.A., Chair of the Faction, and Krismawati, S.Sos., Secretary of the Faction.*

Keywords: *General View; Golkar Demokrat Faction; 2027 Draft APBD; Kebumen Regency Budget; Fiscal Independence; Regional Own-Source Revenue; Infrastructure; Education; Health; MSMEs; Poverty; Stunting*